Bab I

Pendahuluan

1.1 Latar belakang :

Pada prinsipnya sesuai dengan sifat hukum pidana sebagai hukum publik tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok orang (suatu organisasi) dengan berbagai kepentingan bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat.¹ Berbagai kepentingan yang bersifat kemasyarakatan tersebut antara lain ialah ketentraman, ketenangan dan ketertiban dalam ber-masyarakat. Tujuan adanya pemidanaan tidak akan berjalan maksimal apabila seseorang yang melakukan suatu pelanggaran hukum tidak dikenakan sanksi. Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia harus sesuai dengan falsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara.

Dengan demikian adanya hukum pidana di Indonesia yakni mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan adanya hukum pidana dibagi menjadi 2 (dua), yakni :

1. Tujuan adanya hukum pidana sebagai hukum Sanksi. Tujuan ini yang bersifat konseptual serta filsafati yang tujuannya memberikan dasar dengan adanya sanksi pidana. Jenis serta bentuk dan sanksi pidana sekaligus sebagai parameter dalam menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak tertulis dalam pasal hukum pidana tapi bisa dibaca dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana serta terhadap orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini dapat bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas serta konkret yang relevan dengan problem yang muncul disaat akibat pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana. Tujuan ini merupakan perwujudan dari tujuan pertama.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).² Narapidana tidak berbeda dari manusia lainnya yang dimana sewaktu-waktu bisa melakukan kesalahan ataupun kekhilafan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan pemidanaan yang dimaksud sebagai upaya untuk menyadarkan para

¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2005), hal. 52

² UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 1995

narapidana atau anak pidana agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik. Sistem Pemasyarakatan adalah menjadikan warga binaan dapat menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat dan mereka berperan bebas serta bertanggungjawab. manusia seutuhnya ditafsirkan narapidana dan anak pidana sebagai sosok manusia yang dapat diarahkan kefitrahnya dalam menjalin hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, berpribadi yang baik serta lingkungan. Sedangkan tafsir terintegrasi secara sehat dijelaskan sebagai pemulihan hubungan warga binaan pemasyarakatan. Tujuan dari penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan yakni pembentukan warga binaan menjadi manusia yang seutuhnya, dapat menyadari suatu kesalahan, dapat memperbaiki diri, tidak lagi mengulangi tindak pidana, kembali kemasyarakat, aktif dalam pembangunan, hidup wajar sebagai warganegara dan bertanggung jawab. Sedangkan fungsi penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan adalah menjadikan warga binaan dapat menyatu (integral) dengan sehat dalam masyarakat dan dapat berperan bebas serta dapat bertanggung jawab. Maksud dari manusia seutuhnya yakni ditafsirkan narapidana dan anak pidana sebagai sosok manusia yang diarahkan kefitrahnya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan, pribadi serta lingkungan. Remisi merupakan suatu hak bagi narapidana dan dapat berlaku bagi siapapun sepanjang narapidana tersebut dapat menjalani hukuman pidana sementara, bukan hukuman pidana seumur hidup dan pidana mati. Remisi diatur dalam Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dan Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999. Dalam sistem baru pembinaan bagi narapidana, remisi dapat ditempatkan sebagai salah satu motivasi bagi narapidana untuk membina diri sendiri. Sebab, remisi tidak hanya sebagai hukum yang dimana dalam Sistem Pemasyarakatan, tidak pula sebagai anugerah sebagaimana dalam sistem kepenjaraan, tetapi sebagai hak dan kewajiban bagi narapidana. Artinya jika para narapidana benar-benar dapat melaksanakan kewajibannya, ia berhak untuk mendapatkan remisi, sepanjang persyaratannya telah dipenuhi.³

Hak narapidana yang dalam perundang-undangan antara lain dapat melakukan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya, serta mendapat perawatan yang baik, perawatan rohani maupun jasmani, kemudian mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan mendapatkan makanan yang layak, dapat menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan serta mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan, dapat menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya, mendapatkan masa pengurangan pidana (remisi), kemudian mendapatkan suatu kesempatan berasimilasi termasuk cuti yakni mengunjungi keluarga, mendapatkan kebebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas dan mendapatkan hak-hak lain, sesuai dengan adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Mengenai dalam hak-hak narapidana telah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (selanjutnya disebut PP).

Remisi merupakan salah satu bagian dari sebuah fasilitas pembinaan yang dimana tidak dapat dipisahkan dari suatu fasilitas pembinaan yang lainnya, di mana hakekat pembinaan merupakan selain dalam memberikan sanksi yang bersifat punitif, juga dapat memberikan reward sebagai salah satu dalam upaya pembinaan, program pembinaan yang dapat berjalan dan dapat direspon oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, sedangkan tujuan dari

³ C.I. Harsono Hs, Sistem Baru Pemidanaan Narapidana, Jakarta : Djembatan, 1995: hlm.26

suatu Sistem Pemasyarakatan yakni dapat mengupayakan warga binaan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya melanggar hukum yang pernah dilakukan sebagai warga masyarakat serta dapat melakukan aktif sebagaimana anggota masyarakat lainnya. Pemberian remisi tidak dianggap suatu bentuk kemudahan-kemudahan bagi warga binaan pemasyarakatan untuk cepat bebas, tetapi dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan sebuah kualitas diri sekaligus dapat memotivasi diri, sehingga mendorong warga binaan pemasyarakatan kembali memilih jalan kebenaran. Kesadaran untuk menerima dengan baik pembinaan yang dapat dilakukan oleh Lapas maupun Rutan dapat berpengaruh terhadap kelangsungan kehidupan di masa mendatang. Perlu disadari bahwa setiap manusia mempunyai dua potensi dalam kehidupannya, yakni potensi untuk melakukan perbuatan baik dan potensi untuk melakukan perbuatan yang buruk (jahat), sehingga siapapun yang dapat berbuat salah atau khilaf. Namun dengan tekad serta kesungguhan hati untuk memperbaiki diri, niscaya masyarakat akan memberikan suatu apresiasi dan kepercayaan kepada warga binaan pemasyarakatan untuk berada kembali ditengah-tengah masyarakat. Pemberian remisi yang dimaksudkan juga untuk mengurangi dampak negatif dari sub-kultur tempat pelaksanaan pidana, disparitas pidana dan akibat pidana perampasan kemerdekaan.⁴ Syarat dalam Pemberian Revisi Berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 tahun 1999, yaitu usulan remisi diajukan kepada Menteri Hukum dan Perundang-undangan oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara yang melalui Kepala Kantor Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Sementara berdasarkan Pasal 13 Ayat (2) menyebutkan bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan tentang adanya remisi (tersebut) dapat diberitahukan kepada para narapidana dan anak pidana pada Peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus bagi mereka yang diberikan remisi pada peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia atau pada hari besar keagamaan yang dianut oleh para narapidana dan anak pidana yang bersangkutan. Kriteria dalam melakukan pemberian remisi perlu diperjelas, sehingga dapat menutup peluang remisi menjadi komoditas. Mesti remisi adalah hak narapidana, tetap perlu adanya kondisi khusus yang mereka ikut menentukan diberi atau tidaknya pengurangan hukuman dan lamanya pengurangan hukuman bagi narapidana. Sebagai lembaga pembinaan, posisinya sangat strategis dalam merealisasikan tujuan akhir dari sistem peradilan, yaitu rehabilitasi dan resosialisasi dalam pelanggaran hukum, bahkan sampai kepada penanggulangan kejahatan (*suppression of crime*). Keberhasilan atau kegagalan yang dilakukan oleh Lapas akan memberikan kemungkinan penilaian yang dapat bersifat positif maupun negatif.⁵

⁴ Menteri Hukum dan HAM, Sambutan Menteri Hukum dan Ham RI Pada upacara Pemberian Remisi Kepada Warga Binaan Pemasyarakatan Pada Upacara Memperingati Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI Ke 63, Jakarta, 17 Agustus 2008

⁵ Petrus Irwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jakarta : Sinar Harapan, 1995, hlm.65

1.2. Rumusan masalah:

Berdasarkan uraian permasalahan dari latar belakang diatas maka yang dapat kami teliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi para narapidana dan apa saja kendala pemberian remisi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pancur Batu ?
2. Bagaimana langkah-langkah yang di tempuh oleh petugas lapas dalam mensosialisasikan pemberian remisi terhadap narapidana ?

1.3 Tujuan penelitian:

Penulisan dalam jurnal ini melakukan penelitian yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana sehingga terdapat suatu tujuan , yakni dalam hal penulisan jurnal ini juga mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai dalam suatu permasalahan .Berikut adalah tujuan dari penelitian yang telah disusun oleh penulis :

1. Untuk dapat mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana
2. Untuk dapat mengetahui analisis terhadap langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh petugas dalam lapas untuk mensosialisasikan pemberian remisi terhadap narapidana

1.4. Manfaat penelitian :

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis, masyarakat dan para penegak hukum dapat mengetahui efektifitas, pemberian remisi bagi narapidana sehingga, tidak dapat menimbulkan adanya asumsi-asumsi yang tidak benar terhadap para narapidana.

Selain itu, dalam penulisan ini diharapkan dapat memberikan referensi baru terhadap mahasiswa hukum lainnya, yang ingin membahas pemberian remisi terhadap para narapidana.

Adapun manfaat penelitian dilihat dari dua aspek yaitu:

1. Manfaat teoritis

- Dapat bermanfaat sebagai sarana bagi penulis untuk memperluas wawasan mahasiswa dalam menganalisis tentang pemberian remisi kepada narapidana.
- Dapat memberikan suatu pemikiran yang mengenai pengetahuan dibidang hukum pidana dan keefektifan pelaksanaan pemberian remisi di lapas.

2. Manfaat praktis

- Bagi para mahasiswa, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu mengetahui serta menambah wawasan tentang kendala- kendala yang dapat terjadi dalam pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana.
- Bagi masyarakat, dapat diharapkan mampu dalam menganalisis terhadap langkah-langkah yang ditempuh oleh para petugas dalam lapas untuk mensosialisasikan pemberian remisi terhadap narapidana.